

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
SEMESTA BERENCANA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026, sehingga pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan-nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Denpasar, 02 September 2024

  
**Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Provinsi Bali**  
**Ir. PUTU SUMARDIANA, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670714 199403 1 003

## DAFTAR ISI

<b>RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III.....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Sampai dengan TW III dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.3 Review terhadap RKPD .....	22
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>25</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah	25
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	26
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya

berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Perubahan Provinsi, Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 pada bulan September Tahun 2024, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah

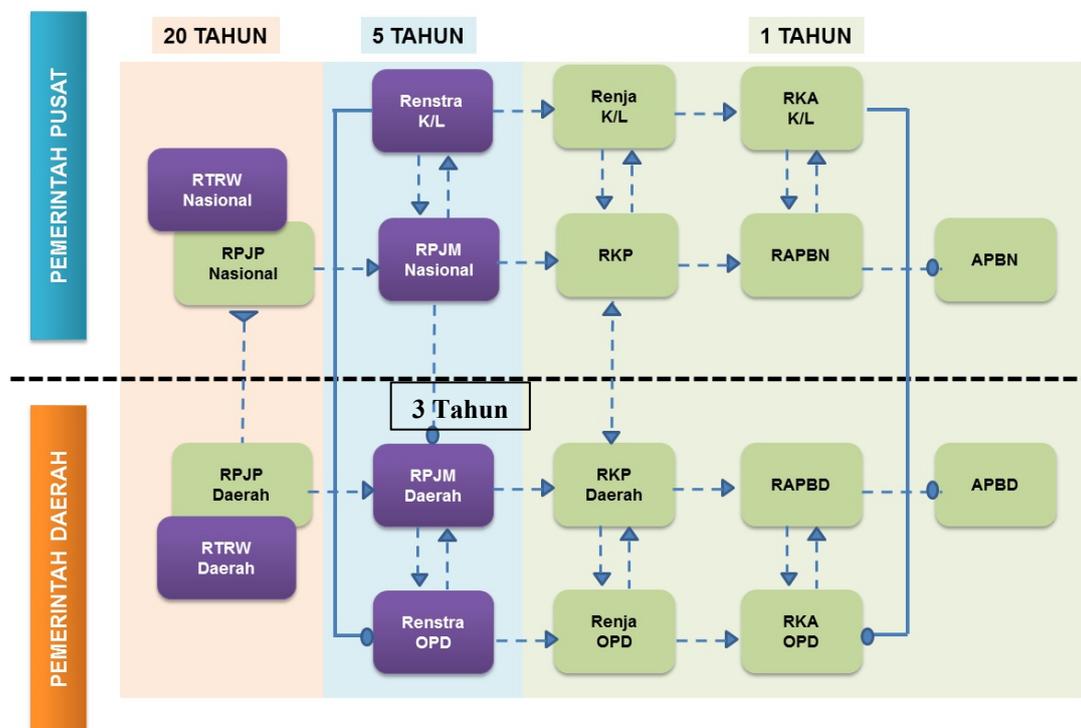
(RPD) Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 diawali dengan mengajukan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Diagram 1.1**

Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar di atas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

## 1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2024 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2024 dan setelah RKPD Perubahan

ditetapkan, maka Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2024 akan disesuaikan pada RKPD Perubahan tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2024;
2. Merancang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dengan RKPD Perubahan tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

Bab II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan TW III berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Sampai dengan TW III dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD Perubahan, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab III Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

Bab IV Renja Perubahan Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V PENITUP**

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

Dalam BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Sampai dengan TW III dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan), kemudian di tetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024 TW III			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	5,60%	96,72%	Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	(Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19%	92,12%	91,95%	Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha	2%	0,5%	25%	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	80 Nilai	98,77%	Evaluasi Manajemen Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa **pada triwulan III Tahun 2024 kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali tercatat sebesar 5,60 %** dari total kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 13,43% pada Triwulan III Tahun 2024, Kontribusi terbesar PDRB berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Bali pada periode ini adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai sekitar 20,64% dari total PDRB Provinsi Bali. Kontribusi yang besar dari sektor tersebut mencerminkan struktur ekonomi Provinsi Bali yang di dominasi oleh sektor pariwisata. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di tahun 2024 Triwulan III sebesar 4% dari 6% yang telah di targetkan pada tahun 2024**, data ini diperoleh berdasarkan jumlah pemanfaatan ruang laut berdasarkan data BPSPL Denpasar sebanyak 523 Pelaku Usaha dengan Jumlah Verifikasi yang dikeluarkan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebanyak 19 Pelaku Usaha.

**Meningkatnya kesejahteraan Nelayan di Provinsi Bali di hitung melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 92,12% di Tahun 2024 sampai dengan triwulan III**, NTN dihitung dari Indeks Harga yang diterima nelayan dibagi dengan Indeks Harga yang dibayar nelayan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk biaya produksi. **Pada Sasaran terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan** dihitung melalui Indeks Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha yang di kelompokkan berdasarkan sub sektor antara lain (1) kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut; (2) kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap; (3) kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya; dan (4) kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang berkaitan dengan Sasaran Strategis ini baru melaksanakan kegiatan terkait Pengawasan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Kewenangan Provinsi serta kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menyebabkan **Capaian Sasaran ini baru tercapai sebesar 0,5% dari 2% yang telah di targetkan.**

Pada sasaran meningkatnya manajemen kinerja organisasi di gunakan tolak ukur **Nilai Manajemen Kinerja Organisasi dimana sampai dengan triwulan III Tahun 2024 tercapai sebesar 81 Nilai atau sudah tercapai sebesar 100%**, pengukuran di lakukan untuk melihat kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator kinerja dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2**

## Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,79%	5,60%	96,72%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya serta Meningkatkan konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	6%	4%	66,67%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	100,19 %	92,12%	91,95%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha	2%	0,5%	25%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	80	98,77%	Pencapaian Realisasi Triwulan III Tahun 2024	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari tabel di atas dapat kita amati bahwa Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis di atas terukur dan dapat dicapai meskipun realisasinya **belum semua mencapai 100%**. Terhadap permasalahan yang muncul dapat ditangani melalui solusi antara lain (1) Sasaran Meningkatnya sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui peningkatan pengajuan penerbitan izin usaha perikanan serta peningkatan pengelolaan budidaya perikanan di darat, kemudian untuk solusi Meningkatkan konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan melalui peningkatan unit usaha pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar izin usaha serta peningkatan mutu produk hasil perikanan; (2)

Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil solusi yang dilakukan antara lain Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan melalui peningkatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan pengajuan verifikasi teknis kesesuaian rung perizinan berusaha, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Nelayan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap melalui peningkatan produksi perikanan tangkap serta peningkatan usaha perikanan tangkap di pelabuhan; (4) Sasaran Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui menyelenggarakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepada unit usaha perikanan; dan (5) Sasaran Strategis Meningkatnya manajemen kinerja organisasi solusi yang dilakukan yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui menyusun laporan keuangan dengan baik, peningkatan layanan administrasi umum perangkat daerah, mewujudkan pengadaan barang milik daerah, peningkatan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta mewujudkan barang milik daerah dalam kondisi baik.

Kemudian untuk mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut dapat diamati pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 3**  
Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	5,79%	4,41%	76,17%	2.950.639.720	967.760.168	33%
2	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	6%	4%	66,67%	1.376.733.520	668.289.430	49%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
3	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	100,19 %	92,12%	91,95%	481.614.400	174.264.030	36%
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2%	0,5%	25%	562.144.940	91.214.760	16%
5	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	81	80	98,77%	26.409.982.152	18.133.779.724	69%
TOTAL					31.299.982.346	20.035.308.112	64%

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung pencapaian Indikator Kinerja tersebut dengan jumlah dana yang dianggarkan cukup besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga dapat menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dengan baik walaupun capaian realisasi sudah tergolong cukup Baik **sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 20.035.308.112,00-** dengan target tahun 2024 sebesar Rp. 31.299.982.346,00- dengan tingkat **capaian sebesar 64 %**,

Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 2. 4**  
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, Dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil	44%	44%	100%	Menunjang
		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	102.575,33 Ha	44.813,58 Ha	43,69%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan</i>	4 Kelompok	16 Kelompok	400%	Menunjang
2	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>	103.696,1 Ton	76.429,70 Ton	73,71%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan</i>	8.000 Ton	3.675 Ton	45,94%	Menunjang
3	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</i>	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	32.645,12 Ton	23.352,31 Ton	71,53 %	Menunjang
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	1%	50%	Menunjang
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/Kpt/Tahun	48 Kg/Kpt/Tahun	94,23%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina</i>	25 Unit Usaha	23 Unit Usaha	92,00%	Menunjang
4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2%	0,5%	25%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya</i>	<i>Jumlah Pengawasan kepada pelaku</i>	30 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	27%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
		<i>Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	<i>usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil</i>				
<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya</b>							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</i>	<i>Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas</i>	1.250.000 Ekor	2.247.600 Ekor	180%	Menunjang
<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>							
1	Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	1%	50%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</i>	<i>Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	2.500 Rekomendasi	2744 Rekomendasi	110%	Menunjang
<b>UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali</b>							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil	Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71%	3,71%	5%	Menunjang
		<i>Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>	4	2	50%	Menunjang
<b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %	1 %	50 %	Menunjang
		<i>Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</i>	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan</i>	8.000 Ton	3.675 Ton	45,94%	Menunjang

Terdapat 5 (lima) Program yang menunjang Capaian Kinerja tersebut. Pada Sasaran Strategis Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, Pada Sasaran Strategis Meningkatkan kesejahteraan Nelayan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kemudian pada Sasaran Strategis Meningkatkan Sektor Kelautan Terhadap PDRB terdapat 2 (dua) program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta pada Sasaran Strategis Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat 1 (satu) Program yang menunjang pencapaian tersebut yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Selain kelima program di atas, Program dan Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5**  
Capaian Program dan Kegiatan Pendukung Kesekretariatan

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							
1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Dokumen	16 Dokumen	27%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

**UPTD Produksi Perikanan Budidaya**

1	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
<b>UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali</b>							
1	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Ket
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
<b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>							
1	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung
		<i>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	100%	75%	75%	Pendukung

Jika dilihat pada tabel di atas capaian Kegiatan pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 baru mencapai 75% dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan

berikutnya. Pada capaian Program sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sudah mencapai 98,77%.

### **2.3 Review terhadap RKPD**

Dalam Review terhadap RKPD Perubahan diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan Triwulan III dan kebutuhan tahun 2024. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD Perubahan, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2024, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan Beberapa indikator berbeda karena mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Lampiran Tabel T-C 31).

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;

2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

**Tabel T-C 32**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	<i>Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</i>
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 %	<i>= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%</i>
			Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 %	<i>= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%</i>
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)</i>
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/ Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)</i>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 %	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelakun usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan</i>
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 %	<i>= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun - n)/ Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)</i>
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/ Kapita/ Tahun	<i>AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat</i>
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 %	<i>= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/ Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)</i>

Untuk lebih lengkapnya terkait hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dapat dilihat pada Lampiran. (Tabel T-C. 29, Tabel T-C. 30, Tabel T-C. 31).

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk menyusun Tujuan dan Sasaran diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada RPD Provinsi Bali 2024-2026. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusun telaahan kebijakan Kelautan dan Perikanan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada RPJMN secara ringkas adalah : Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Kelautan dan Perikanan serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali dengan indikator Angka Kemiskinan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Sasaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
3. Meningkatnya kesejahteraan Nelayan;

4. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dikembangkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program kegiatan dan sub kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan penjelasan mengenai : a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/ kegiatan/ sub kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat diamati pada (lampiran Tabel T-C 33).

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN PROVINSI BALI**

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 33.208.808.918,00. Program – program tersebut diuraikan sebagai berikut:

- | <b>No</b> | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>   |
|-----------|--|
| <b>1</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |
| <b>1</b>  | <b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>   |
|           | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |
| <b>2</b>  | <b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>   |
|           | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |
|           | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |
|           | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |
|           | 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |
|           | 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |
| <b>3</b>  | <b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>                                       |
|           | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |
| <b>4</b>  | <b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>   |
|           | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
|           | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |
| <b>5</b>  | <b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                                  |
|           | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|           | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |
|           | 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |

- 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
  - 1 *Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
    - 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
    - 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
  - 2 *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil***
    - 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
  - 1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil***
    - 1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - 2 *Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT***
    - 1 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - 3 *Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi***
    - 1 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
  - 1 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***
    - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
    - 2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - 2 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat***
    - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

***1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***

- 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- 2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

**6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

***1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar***

- 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 ini, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan beserta Indikator dan Target yang telah ditetapkan sehingga tercapainya Pembangunan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Rencana Strategis.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024, Terima kasih.

Denpasar, 02 September 2024

**Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Provinsi Bali**



**Ir. PUTU SUMARDIANA, MP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670714 199403 1 003

Tabel T- C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan III  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(5+7+10)	12=(11/4)					
3		Usuran Pemerintaan Pilihan														
3	25	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
3	25	01	Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%		
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%		
3	25	01	1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
3	25	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%
3	25	01	1.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	0	4	0	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	700	260	260	260	100,00%	60	44	564	81%
3	25	01	1.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	590	114	118	108	91,53%	118	102	324	55%
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3 25 01 1.06 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	0	1	0	0,00%	5	5	5	31%	
3 25 01 1.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23	0	1	0	0,00%	7	2	2	9%	
3 25 01 1.06 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	17	1	1	1	100,00%	5	4	6	35%	
3 25 01 1.06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3 25 01 1.06 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3 25 01 1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3 25 01 1.07 10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	0	1	0	0,00%	3	2	2	18%	
3 25 01 1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3 25 01 1.08 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	0	0	0%	
3 25 01 1.08 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	0	12	0	0,00%	12	9	9	15%	
3 25 01 1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3 25 01 1.09 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	43	8	8	8	100,00%	9	7	23	53%	
3 25 01 1.09 09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	3	3	3	100,00%	3	2	8	53%	
3 25 01 1.09 10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	0	1	0	0,00%	10	1	1	3%	
3 25 02	Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	44%	44,00%	44,00%	44%	
		Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	Kawasan	5	2	5	4	80,00%	0	0	4	80%	
3 25 02 1.01	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	21.192,51	76.822,74	44.712,50	58,20%	102.575,33	44.813,58	44.712,50	44%	
3 25 02 1.01 01	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	1	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	57.862,83	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	37%	
3	25	02	1.01	03	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	22.022,74	0,00	22.022,74	0	0,00%	0	0	0,00	0%	
3	25	02	1.02		Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	150	33	40	62	155,00%	0	0	95	63%	
3	25	02	1.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	110	32	40	48	120,00%	0	0	80	73%	
3	25	02	1.03		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	23	4	4	2	50,00%	4	12	18	78%	
3	25	02	1.03	01	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	210	40	30	38	126,67%	40	40	118	56%	
3	25	02	1.03	02	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	15	4	0	0	0,00%	4	12	16	107%	
3	25	02	1.03	03	Sub Kegiatan : Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	150	0	0	0	0,00%	40	40	40	27%	
3	25	02	1.03	04	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	4	4	2	50,00%	4	0	6	30%	
3	25	03			<b>Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>Persen</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>17%</b>	
						<b>Jumlah produksi perikanan tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>212.436,35</b>	<b>124.010,15</b>	<b>107.269,84</b>	<b>110.863,70</b>	<b>103,35%</b>	<b>103696,1</b>	<b>76429,7</b>	<b>311.303,55</b>	<b>147%</b>	
3	25	03	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	317.351,54	0	0,00	0	0,00%	103.696,10	76.429,70	76.429,70	24%	
						Tersedianya data dan Informasi sumber daya ikan	Kali	6	0	3	0	0,00%	0	0	0	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	03	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	15	1	3	0	0,00%	0	0	1	7%	
3	25	03	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	16	0	4	0	0,00%	4	1	1	6%	
3	25	03	1.01	03	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	50	5	25	20	80,00%	0	0	25	50%	
3	25	03	1.09		Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	25.500	0	0	0	0,00%	8.000	3.675	3.675	14%	
3	25	03	1.09	02	Sub Kegiatan : Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	90	0	0	0	0,00%	30	30	30	33%	
3	25	04			<b>Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>Persen</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>0,01</b>	<b>17%</b>	
						<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>38.342,02</b>	<b>32.060,08</b>	<b>19.360,82</b>	<b>32.220,50</b>	<b>166,42%</b>	<b>32645,1</b>	<b>23966,41</b>	<b>88.246,99</b>	<b>230%</b>	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	465	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	99.906,86	0	0,00	0,00	0,00%	32.645,10	23.966,41	23.966,41	24%	
						Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kali	72	0	40	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	25	0	10	10	100,00%	1	0	10	40%	
3	25	04	1.05	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti Bimtek Rumpuk Laut	Orang	210	0	120	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	04	1.05	06	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	162	0	40	0	0,00%	6	6	6	4%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	140	25	25	28	112,00%	25	46	99	71%	
3	25	06	1.03		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Potensi Peluang Usaha Investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Potensi	18	0	9	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	06	1.03	01	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	0	1	0	0,00%	0	0	0	0%	
<b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya</b>																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0		80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	1	100,00%	1	1	2	40%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	1	3	60%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	0	1	1	100,00%	2	0	1	13%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	75%	75%	75%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	0	24	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00%	12	9	33	55%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	5	5	5	100,00%	5	3	13	52%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	0	0	0	0,00%	3	1	1	11%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	0	3	3	100,00%	3	3	6	40%	
3	25	04			Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
						Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	Komoditas	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	6.210.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	1.250.000	2.247.600	6.150.050	99%	
3	25	04	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	2	2	33%	
						Jumlah paket teknologi perikanan budidaya	Paket	6	3	3	3	100,00%	0	0	6	100%	
3	25	04	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	0	0	0	0,00%	4	2	2	13%	
						jumlah benih, calon induk dan induk	Ekor	2.310.000	2.692.450	1.210.000	1.210.000	100,00%	0	0	3.902.450	169%	
<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%			
3	25	01	1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	75,00%	100,00%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0,00%	1	0	0	0%
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	1	0,00%	1	1,00	1,00	17%
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	100,00%	1	1,00	3,00	50%
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0,00%	100%	75%	75%	75%
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0,00%	1	0,25	0,25	8%
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	100%	0,00%	100%	75,00%	75,00%	75%
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	0,00%	12	7,00	7,00	10%
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	0	2	0,00%	0	0	0	0%
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	75,00%	100,00%	100%
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	1	4	100,00%	4	3,00	8,00	33%
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96	0	16	0,00%	16	2,00	2,00	2%
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	100,00%	1	0,47	2,47	41%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	0	0	0,00%	2	0,00	0	0%	
3	25	06			Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	6%	0%	0%	0%	0,00%	2%	1,00%	0,01	17%	
						Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	Sampel	14.850	2.955	5.000	2680	53,60%	0	0	5.635	38%	
3	25	06	1.02		Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	7.800	0	0	0	0,00%	2.500	2.744	2.744	35%	
						Jumlah UPI yang Menerapkan Persyaratan Sertifikasi SNI	UPI	111	140	37	70	189,19%	0	0	210	189%	
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	180	133	30	63	210,00%	30	85	281	156%	
3	25	06	1.02	02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	42	7	7	7	100,00%	7	4	18	43%	
<b>UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali</b>																	
3	25	01			Program : Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	2	3	33%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	1	3	50%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	0	1	1	100,00%	2	0	1	11%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Dokumen	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	0	12	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	66%	100%	100%	
3	25	01	1.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	12	24	33%	
3	25	01	1.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0	12	12	100,00%	12	8	20	28%	
3	25	01	1.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	5	5	5	100,00%	5	4	14	47%	
3	25	01	1.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	0	1	100%	
3	25	01	1.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	02			Program : Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persen	74%	0	0%	0	0,00%	71%	2,42%	2,42%	3%	
						Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	5	1	1	2	200,00%	0	0	2	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
3	25	02	1.01		Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	6	0	0	0	0,00%	4	2	2	33%	
						Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Ha	21.192,51	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	0	0	21.192,51	100%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	46.838,10	21.192,51	21.192,51	21.192,51	100,00%	44.712,50	20.057,00	21.192,51	45%	
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
<b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>																	
3	25	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83	0	0	0	0,00%	81	80	80	96%	
						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	80	79	80	80	100,00%	0	0	80	100%	
3	25	01	1.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3	25	01	1.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	1	1	1	100,00%	1	0	2	33%	
3	25	01	1.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	33	1	1	1	100,00%	10	10	12	36%	
3	25	01	1.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	0	2	40%	
3	25	01	1.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	1	1	1	100,00%	2	0	2	22%	
3	25	01	1.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	12	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	
3	25	01	1.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100,00%	0	0	24	67%	
3	25	01	1.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	50%	50%	50%	
3	25	01	1.07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3	25	01	1.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	50%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024 TW III)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3 25 01 1.08 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	0	0	0	0,00%	12	0	0	0%	
3 25 01 1.08 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	100,00%	12	5	29	40%	
3 25 01 1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	75%	100%	100%	
3 25 01 1.09 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	2	2	2	100,00%	2	2	6	50%	
3 25 01 1.09 09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	1	0	0,00%	1	0	0	0%	
3 25 01 1.09 10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0,00%	1	0	0	0%	
3 25 03	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	6%	0	0	0	0,00%	2%	1%	0,01	17%	
		Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Pelabuhan	2	1	2	2	100,00%	0	2	5	250%	
3 25 03 1.06	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	25.500	4.750	5.000	4.981	99,62%	8.000	3.675	13.406	53%	
		Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPIB dan keamanan keselamatan nelayan	Layanan	292	0	116	50	43,10%	0	0	50	17%	
3 25 03 1.06 01	Sub Kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan	Pelabuhan Perikanan	2	0	2	0	0,00%	0	0	0	0%	
3 25 03 1.06 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	152	0	2	0	0,00%	50	0	0	0%	
3 25 03 1.06 03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	307	3	116	4	3,45%	5	2	9	3%	

## LAMPIRAN II

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Bali**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	79 Nilai	80 Nilai	N/A	N/A	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	N/A	81	82	N/A	N/A	81	82	
3	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya			4 Kawasan	5 Kawasan	N/A	N/A	2	4	N/A	N/A	
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			1 Kawasan	1 Kawasan	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	
5	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			N/A	N/A	44%	46%	N/A	N/A	44%	46%	Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K dikali 100%
6	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			N/A	N/A	71%	73%	N/A	N/A	76,49%	73%	Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
7	Jumlah produksi perikanan tangkap			105.166,51 Ton	107.269,84 Ton	N/A	N/A	124.010,15 Ton	110.863,70 Ton	N/A	N/A	
8	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan			1 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	N/A	N/A	
9	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun n-1) x 100%
10	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			18.981,20 Ton	19.360,82 Ton			32.060,08 Ton	31.220,50 Ton	N/A	N/A	
11	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut			3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	N/A	N/A	
12	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1) x 100%
13	Jumlah pelaku usaha taat Hukum			18 Pelaku Usaha	23 Pelaku Usaha	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Trealisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
14	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			N/A	N/A	2%	3%	N/A	N/A	1%	3%	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang ter-data pada tahun berjalan
15	Jumlah produk perikanan bersertifikat			149 SKP	151 SKP	N/A	N/A	282 SKP	189 SKP	N/A	N/A	
16	Jumlah Hasil Uji yang Dikeluarkan			4.950 Sampel	5000 Sampel	N/A	N/A	2.695 sampel	3.720 Sampel	N/A	N/A	
17	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun n-1)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun n-1) x 100%
18	Tingkat Konsumsi Ikan			N/A	N/A	48,68 Kg/Kpt/ Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	N/A	N/A	48 Kg/Kpt/Tahun	49,65 Kg/Kpt/ Tahun	AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat
19	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			N/A	N/A	2%	2%	N/A	N/A	1%	2%	Jumlah sampel yang di uji Tahun n - Jumlah sampel yang di uji Tahun - n)/Jumlah sampel yang di uji tahun -n x 100%)

**Tabel T-C 31**  
**Review terhadap RKPD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2024**

No	RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024 Perubahan				Catatan
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>24.280.909.261</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>24.280.909.261</b>	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	20.987.785.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	20.987.785.114	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	994.407.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	994.407.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	158.284.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	158.284.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	141.162.905	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	141.162.905	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.999.269.242	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.999.269.242	
2	<b>Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</b>	<b>44%</b>	<b>518.634.000</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</b>	<b>44%</b>	<b>518.634.000</b>	

		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102.575,33 Ha	4.402.200		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102.575,33 Ha	4.402.200	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	514.231.800		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	514.231.800	
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2%</b>	<b>553.910.920</b>		<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2%</b>	<b>553.910.920</b>	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103.696,10 Ton	544.310.920		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103.696,10 Ton	544.310.920	
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8.000 Ton	9.600.000		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8.000 Ton	9.600.000	
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>		<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>2%</b>	<b>54.000.000</b>		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>2%</b>	<b>54.000.000</b>	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645,10 Ton	54.000.000		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645,10 Ton	54.000.000	
<b>5</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>		<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku</b>		<b>713.278.940</b>		<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku</b>		<b>713.278.940</b>	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	713.278.940		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	713.278.940	

6	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>		<b>Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan</b>	2%	525.050.280	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>		<b>Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan</b>	2%	525.050.280	
			<b>Tingkat Konsumsi Ikan</b>	48,68 Kg/Kpt/Th				<b>Tingkat Konsumsi Ikan</b>	48,68 Kg/Kpt/Th		
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha	525.050.280		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha	525.050.280	

**UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**

1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	81 Nilai	533.047.886	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	81 Nilai	533.047.886	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	43.067.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	43.067.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	30.795.800		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	30.795.800	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	96.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	96.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	363.185.086		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	363.185.086	
2	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>		<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	2%	2.307.359.010	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>		<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	2%	2.307.359.010	

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1.250.000 Ekor	2.307.359.010		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1.250.000 Ekor	2.307.359.010	
--	--	--	----------------	---------------	--	--	--	----------------	---------------	--

**UPTD PENGUJIAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN**

<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>840.186.660</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>840.186.660</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	53.133.200		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	53.133.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	49.316.100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	49.316.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	108.600.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	108.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	629.137.360		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	629.137.360
<b>2</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan</b>	<b>2%</b>	<b>445.359.821</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan</b>	<b>2%</b>	<b>445.359.821</b>	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2.500 Rekomendasi	445.359.821		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2.500 Rekomendasi	445.359.821

**UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI**

<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>1.293.815.800</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>1.293.815.800</b>	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	50.323.800		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	50.323.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	107.115.400		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	107.115.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	21.992.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	21.992.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.114.384.600		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.114.384.600
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71%</b>	<b>731.690.000</b>	<b>Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71%</b>	<b>731.690.000</b>	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	731.690.000		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	731.690.000
<b>UPTD PELABUHAN PERIKANAN</b>									
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>355.667.140</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>355.667.140</b>	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	52.301.600		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	52.301.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	88.131.400		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	88.131.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	10.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	10.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	205.234.140		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	205.234.140	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2%</b>	<b>55.899.200</b>		<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>2%</b>	<b>55.899.200</b>	
	Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8.000 Ton	55.899.200		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8.000 Ton	55.899.200	
				<b>33.208.808.918</b>					<b>33.208.808.918</b>	

Tabel T-C 33  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Tahun 2024				Bertambah / (Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan								
										Sebelum		Sesudah			K	Rp									
										K	Rp	K	Rp					K	Rp						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																									
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																									
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81			81				82									
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	23.341.205.832	81	24.280.909.261	939.703.429	82	27.254.257.898								
			3	25	01	102		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	20.110.224.000	60	20.987.785.114	877.561.114	60	23.748.340.878								
			3	25	01	102	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	118	20.110.224.000	118	20.987.785.114	877.561.114	1610	23.748.340.878							
			3	25	01	106		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	962.631.100	100	994.407.400	31.776.300	100	1.199.837.600								
			3	25	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.542.400	5	10.542.400	0	5	7.477.500							
			3	25	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	636.724.000	7	652.648.300	15.924.300	7	816.057.200							
			3	25	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	169.767.300	5	169.767.300	0	5	194.559.400							
			3	25	01	106	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	18.477.400	3	18.477.400	0	3	18.923.500							
			3	25	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	127.120.000	12	142.972.000	15.852.000	12	162.820.000							
			3	25	01	107		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	158.284.600	100	158.284.600	0	100	532.905.760								
			3	25	01	107	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	158.284.600	3	158.284.600	0	3	532.905.760							
			3	25	01	108		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	126.536.000	100	141.162.905	14.626.905	100	131.050.000								
			3	25	01	108	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	126.536.000	12	141.162.905	14.626.905	12	131.050.000							
			3	25	01	109		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	1.983.530.132	100	1.999.269.242	15.739.110	100	1.642.123.660								
			3	25	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	789.220.480	9	851.363.680	62.143.200	9	916.707.980							
			3	25	01	109	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	665.579.652	3	619.175.562	(46.404.090)	3	615.185.680							
			3	25	01	109	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	528.730.000	10	528.730.000	0	10	110.230.000							
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							<b>Persentase Pemanfaatan Ruang Laut</b>	persen	6%		6%			6%			= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Keesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%							
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			<b>Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	44%	660.043.520	44%	518.634.000	-141.409.520	46%	72.901.540	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%							

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Sebelum		Setelah		(Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan	
										K	Rp	10	11		12	K		Rp
										8	9					13		14
1	2	3	4				5	6	7						15			
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	96.902.200	102.575,33	4.402.200	(92.500.000)	102.575,33	14	0
		Tersedianya Regulasi/ Kebijakan tentang RTRW atau Dokumen RZWP-3-K	3	25	02	101	01	Penyusunan dan Penetapan Perairan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	96.902.200	1	4.402.200	(92.500.000)	1	0	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	4	563.141.320	4	514.231.800	(48.909.520)	5	72.901.540	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	40	563.141.320	40	514.231.800	(48.909.520)	50	72.901.540	
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan							Nilai Tukar Nelayan		Persen	100,22		100,22		100,25		Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2	425.715.200	2	553.910.920	128.195.720	2	130.275.420	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	103.696,10	416.115.200	103.696,10	544.310.920	128.195.720	105.770,02	130.275.420	Produksi perikanan tangkap
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	101	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	416.115.200	4	544.310.920	128.195.720	4	130.275.420	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap	3	25	03	109		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	8000	9.600.000	8000	9.600.000	0	8500	0	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3	25	03	109	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	30	9.600.000	30	9.600.000	0	30	0	
	Meningkatnya Sub Sektor Kelautan Terhadap PDRB							Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB		Persen	5,79		5,79		6,02		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	54.000.000	2	54.000.000	0	2	0	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32.645,10	54.000.000	32.645,10	54.000.000	0	33.297,90	0	Produksi perikanan budidaya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	105	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	45.240.000	1	45.240.000	0	5	0	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	3	25	04	105	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	20	8.760.000	6	8.760.000	0	30	0	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	2%	390.987.280	2%	525.050.280	134.063.000	2%	0	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun -n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)
									Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	48,68		48,68		47,72		AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang di	Unit Usaha	25	390.987.280	25	525.050.280	134.063.000	30	0	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	25	390.987.280	50	525.050.280	134.063.000	30	0	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Sebelum		Setelah		(Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan
										K	Rp	10	11		K	Rp	
										8	9	12	13		14	15	
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%		2%			3%		$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persen	2%	562.144.940	2%	713.278.940	151.134.000	3%		0 Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (JKPU / JKPU) x 100% JKPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan	
	Terselenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	101		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	30	562.144.940	30	713.278.940	151.134.000	32	0		
	Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	67.442.140	1	218.576.140	151.134.000	1	0		
	Tersedianya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	101	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	40	494.702.800	40	494.702.800	0	40	0		
<b>UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali</b>											1.991.521.560		2.025.505.800	33.984.240	1.079.888.760		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	1.274.831.560	81	1.293.815.800	18.984.240	82	1.029.888.760	
		3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	50.323.800	100	50.323.800	0	100	66.358.100		
		3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2	5.188.600	2	5.188.600	0	1	0		
		3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	4.967.100	1	4.967.100	0	1	24.858.100		
		3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	38.170.000	1	38.170.000	0	1	41.500.000		
		3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	1.998.100	2	1.998.100	0	2	0		
		3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	107.115.400	100	107.115.400	0	100	0		
		3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	107.115.400	1	107.115.400	0	1	0		
		3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	21.992.000	100	21.992.000	0	100	0		
		3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.992.000	12	1.992.000	0	12	0		
		3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	0	12	0		
		3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.095.400.360	100	1.114.384.600	18.984.240	100	963.530.660		
		3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	151.029.000	5	180.968.000	29.939.000	5	172.570.000		
		3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	944.371.360	1	933.416.600	(10.954.760)	1	790.960.660		
	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persen	71%	716.690.000	71%	731.690.000	15.000.000	73%	50.000.000	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%	
	Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kawasan	4	716.690.000	4	731.690.000	15.000.000	5	50.000.000		

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Sebelum		Setelah		(Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	44.712,50	716.690.000	44.712,50	731.690.000	15.000.000	46.838,10	50.000.000	
<b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>																		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	361.401.640	81	355.667.140	(5.734.500)	82	260.029.160	
			3	25	01	106		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>52.301.600</b>	<b>100</b>	<b>52.301.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>59.010.700</b>	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	19.801.600	10	19.801.600	0	10	26.510.700	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	1	32.500.000	0	1	32.500.000	
			3	25	01	107		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>93.865.900</b>	<b>100</b>	<b>88.131.400</b>	<b>(5.734.500)</b>	<b>100</b>	<b>21.226.320</b>	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	93.865.900	1	88.131.400	(5.734.500)	1	21.226.320	
			3	25	01	108		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12.000.000</b>	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	0	12	12.000.000	
			3	25	01	109		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>205.234.140</b>	<b>100</b>	<b>205.234.140</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>167.792.140</b>	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	107.552.000	2	107.552.000	0	2	130.110.000	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	97.682.140	1	97.682.140	0	1	37.682.140	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>	<b>55.899.200</b>	<b>2</b>	<b>55.899.200</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>47.899.000</b>	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	106		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan</b>	<b>Ton</b>	<b>8000</b>	<b>55.899.200</b>	<b>8000</b>	<b>55.899.200</b>	<b>0</b>	<b>8500</b>	<b>47.899.000</b>	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	55.899.200	5	55.899.200	0	1	47.899.000	
<b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>																		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	879.611.920	81	840.186.660	(39.425.260)	82	744.067.920	
			3	25	01	106		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>53.133.200</b>	<b>100</b>	<b>53.133.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>40.933.000</b>	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.633.200	1	20.633.200	0	1	8.433.000	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	1	32.500.000	0	1	32.500.000	
			3	25	01	107		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>49.316.100</b>	<b>100</b>	<b>49.316.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>56.749.680</b>	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.316.100	1	49.316.100	0	1	56.749.680	
			3	25	01	108		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>108.600.000</b>	<b>100</b>	<b>108.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>117.000.000</b>	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	108.600.000	12	108.600.000	0	12	117.000.000	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Sebelum		Sesudah		(Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan	
										K	Rp	10	11		K	Rp		
										8	9	12	13		14			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	668.562.620	100	629.137.360	(39.425.260)	100	529.385.240	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	117.668.640	4	117.668.640	0	2	92.232.000	
			3	25	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	50.260.500	16	17.290.000	(32.970.500)	16	14.780.000	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	500.633.480	1	494.178.720	(6.454.760)	1	422.373.240	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2%	252.793.371	2%	445.359.821	192.566.450	2%	0	0 = ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/Jumlah sample yang di uji tahun - n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2500	252.793.371	2500	445.359.821	192.566.450	2600	0	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	222.799.371	30	405.765.821	182.966.450	30	0	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	3	25	06	102	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	7	29.994.000	7	39.594.000	9.600.000	7	0	
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali											2.805.790.269		2.840.406.896	34.616.627		625.119.816		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	552.931.200	81	533.047.886	(19.883.314)	82	625.119.816	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	43.067.000	100	43.067.000	0	100	46.781.200	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.274.000	1	5.274.000	0	1	4.664.000	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.293.000	1	5.293.000	0	1	7.117.200	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000	1	32.500.000	0	1	35.000.000	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	30.795.800	100	30.795.800	0	100	38.554.200	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30.795.800	3	30.795.800	0	2	38.554.200	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	96.000.000	100	96.000.000	0	100	128.599.200	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	96.000.000	12	96.000.000	0	12	128.599.200	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	383.068.400	100	363.185.086	(19.883.314)	100	411.185.216	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	114.897.140	5	114.897.140	0	5	124.047.140	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	263.101.260	3	243.217.946	(19.883.314)	3	287.138.076	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.070.000	3	5.070.000	0	3	0	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Sebelum		Sesudah		Perubahan / (Berkurang)	Tahun 2025		Keterangan
										K	Rp	10	11		K	Rp	
										8	9	12	13		14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	2.252.859.069	2	2.307.359.010	54.499.941	2	0 = ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Darat	3	25	04	106		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.250.000	2.252.859.069	1.250.000	2.307.359.010	54.499.941	1.300.000	0 Produksi Perikanan Budidaya pada UPTD P2BAPL
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	106	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1.423.299.450	2	1.423.299.391	(59)	2	0
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	106	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	829.559.619	17	884.059.619	54.500.000	5	0